

ANALISIS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Elok Dining Lestari ¹
elokdininglestari1979@gmail.com

Elsyan R. Marlissa ²
elsyan_marlissa@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of interregional inequality and the influence of population and per capita income on economic development inequality in Papua Mountains Province during the 2018-2022 period. The research method used is associative research with quantitative secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of Yahukimo Regency. Data analysis was conducted using three descriptive tools, namely the Williamson Index to measure the level of inequality, Klassen Typology to classify regions based on economic growth and per capita income, and Location Quotient to identify basic and non-basic sectors. Furthermore, to test the influence of independent variables on inequality, this study applied panel data regression with the help of Eviews 9 software, through a series of model specification tests, classical assumption tests, as well as partial and simultaneous hypothesis tests. The results show that interregional inequality in Papua Mountains Province is classified as high and continues to increase significantly from year to year, with all Williamson Index values falling into the high category. Based on the Klassen Typology, no regency falls into the fast-growing and advanced region category, while Yahukimo and Tolikara Regencies fall into the lagging region category. The Location Quotient analysis results indicate that the agriculture, construction, and various public service sectors are basic or leading sectors. The hypothesis test results prove that population and per capita income, both partially and simultaneously, have a positive and significant effect on economic development inequality. Thus, inequality in Papua Mountains Province is a serious problem triggered by the high population and unequal per capita income, which requires comprehensive and targeted policy interventions.

Keywords: Regional Inequality, Economic Development, Population, Per Capita Income

PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan impian setiap daerah, yang salah satu caranya adalah melalui pembangunan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang memerlukan perubahan besar pada berbagai aspek, seperti sosial, sikap mental, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penurunan angka kemiskinan. Keberhasilan pembangunan ini sering diukur melalui pertumbuhan ekonomi, yang menjadi indikator utama keberhasilan suatu wilayah.

Secara teoretis, pembahasan tentang ketimpangan antar daerah tidak terlepas dari Hipotesis Williamson atau yang sering disebut sebagai kurva U-terbalik (inverted-U hypothesis). Hipotesis ini pertama kali diperkenalkan oleh Williamson (1965, dalam Nagao, 1993) dalam studinya tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional dengan ketimpangan antar wilayah. Williamson menyatakan bahwa pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat secara terus menerus hingga mencapai titik puncaknya, dan baru akan menurun jika proses pembangunan terus berlanjut. Dengan kata lain, kurva ketimpangan berbentuk U terbalik, di mana negara berkembang cenderung memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Hipotesis ini kemudian diuji oleh Williamson menggunakan data time series dan cross-section dari 24 negara, dan terbukti secara empiris. Sementara itu, pemikiran North (1991) lebih berfokus pada peran institusi dan hak milik (property rights) dalam mendorong

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang merupakan ranah kajian yang berbeda namun saling melengkapi dengan studi tentang ketimpangan regional. Selain itu, konsep konvergensi atau hubungan unggul juga menjadi perhatian, karena mengacu pada proses di mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung tumbuh lebih cepat daripada wilayah maju jika didukung oleh akses terhadap teknologi, pengetahuan, investasi pendidikan, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang mendukung.

Beranjak dari kerangka teoretis tersebut, berbagai studi empiris telah dilakukan untuk menguji bagaimana ketimpangan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Nilawati (2019) dalam studinya menemukan bahwa kota-kota besar di Indonesia, terutama di bagian timur, memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur fisik yang lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Namun demikian, keunggulan infrastruktur ini ternyata tidak serta merta menghilangkan ketimpangan. Sebaliknya, di Indonesia bagian timur, tingkat ketimpangan justru sebanding dengan banyak negara di Afrika akibat distribusi infrastruktur yang tidak merata, yang selanjutnya menimbulkan kesenjangan signifikan dalam PDRB per kapita dan pembangunan yang tidak merata di seluruh wilayah. Dalam konteks yang lebih spesifik di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Kurniawati dan Cahyono (2022) menemukan bahwa sektor pertambangan dan penggalian serta jasa kesehatan menjadi sektor prioritas untuk mengoptimalkan PDRB Provinsi Papua, sementara De Fretes (2017) mengidentifikasi sektor-sektor unggulan Papua meliputi pertambangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan.

Dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan, Muharam (2022) di Yogyakarta menemukan bahwa pendidikan dan kemiskinan berdampak substansial terhadap ketimpangan pendapatan, sementara jumlah penduduk justru berkorelasi negatif meskipun tidak signifikan. Sejalan dengan itu, Hartini (2017) dan Sholihah (2013) membuktikan bahwa PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang sesuai dengan Teori Kuznet bahwa dalam jangka pendek terdapat korelasi positif antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan. Selain pendekatan kuantitatif, Perkasa (2023) memberikan perspektif kualitatif yang penting dengan memvalidasi bahwa ketimpangan yang dialami Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satu pemicu konflik, di mana intervensi bantuan tunai justru dikhawatirkan merusak mentalitas kerja OAP dan semakin memperparah ketimpangan.

Secara keseluruhan, beragam studi empiris di atas menunjukkan bahwa ketimpangan antar daerah merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jumlah penduduk, pendapatan per kapita, pendidikan, infrastruktur, kebijakan pemerintah, bahkan faktor budaya dan politik. Memahami kompleksitas tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Papua Pegunungan adalah ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok antara daerah maju dan daerah terpinggirkan, di mana banyak wilayah mengalami pertumbuhan lambat dan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi geografis pegunungan yang sulit diakses menjadikan provinsi ini sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki garis pantai (terkurung daratan), sehingga menghambat konektivitas ekonomi dan distribusi sumber daya. Faktor-faktor lain seperti perbedaan sumber daya alam, alokasi dana pembangunan yang tidak merata, serta kapasitas pemerintah daerah yang terbatas turut memperburuk ketimpangan. Bahkan, pandemi COVID-19 sempat menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang drastis, seperti yang dialami Kabupaten Jayawijaya yang turun hingga -4,08% pada tahun 2020, meskipun setelah pandemi berakhir pertumbuhan ekonomi kembali meningkat.

Berdasarkan seluruh uraian teoretis dan empiris tersebut, penelitian tentang ketimpangan di Provinsi Papua Pegunungan menjadi sangat menarik dan penting untuk dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, provinsi ini merupakan provinsi baru hasil pemekaran yang memiliki karakteristik unik sebagai satu-satunya provinsi terkurung daratan di Indonesia, sehingga kajian tentang ketimpangan ekonominya masih sangat terbatas, padahal berdasarkan indeks Williamson ketimpangan di provinsi ini terus meningkat secara signifikan dalam kategori tinggi pada periode 2018-2022. Kedua, terdapat hubungan erat antara ketimpangan ekonomi dan konflik sosial, di mana ketimpangan yang dialami Orang Asli Papua (OAP) menjadi pemicu konflik yang menghambat pembangunan, sementara kebijakan bantuan tunai justru dikhawatirkan merusak mentalitas kerja OAP sehingga semakin memperparah ketimpangan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan latar belakang teoretis yang kuat, beragam temuan empiris yang telah dikaji, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Ketimpangan Antar Daerah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan*. Penelitian ini diharapkan tidak hanya melengkapi literatur yang masih

terbatas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan periode 2018-2022, meliputi data jumlah penduduk dan PDRB per kapita. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga alat deskriptif: Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan (rendah, sedang, tinggi), Tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, serta Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap ketimpangan, peneliti menerapkan regresi data panel dengan bantuan software Eviews 9, melalui serangkaian uji spesifikasi model (Uji Chow dan Uji Hausman) yang menghasilkan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis parsial (uji t), uji simultan (uji F), uji koefisien determinasi (R^2), serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Jarque-Bera), uji heteroskedastisitas (Glejser), dan uji autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Ketimpangan Wilayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan antar daerah di Provinsi Papua Pegunungan dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, nilai ketimpangan selama periode 2013 hingga 2022 seluruhnya berada di atas 0,5, yang berarti ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi ini termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan yang paling konsisten terjadi pada periode 2018 hingga 2022.

Tabel 1. Indeks Williamson Provinsi Papua Pegunungan

Tahun	Indeks Williamson	Kategori
2013	0,61	Tinggi
2014	0,68	Tinggi
2015	0,73	Tinggi
2016	0,78	Tinggi
2017	0,82	Tinggi
2018	0,87	Tinggi
2019	0,93	Tinggi
2020	0,91	Tinggi
2021	0,91	Tinggi
2022	0,95	Tinggi

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat seluruh nilai Indeks Williamson dari tahun 2013 hingga 2022 berada di atas 0,5, yang berarti bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan selama periode tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2022, indeks mencapai nilai tertinggi sebesar 0,95, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan sangat tinggi dan cenderung memburuk dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di provinsi ini belum berhasil dinikmati secara merata oleh seluruh kabupaten.

Selanjutnya, berdasarkan analisis Tipologi Klassen untuk periode 2018-2022, diketahui bahwa tidak ada satupun kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang termasuk dalam kategori daerah maju dan tumbuh cepat. Klasifikasi lengkap keempat kategori wilayah disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tipologi Klassen Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2018-2022

	$y > \bar{y}$	$y < \bar{y}$
$r > \bar{r}$	Kuadran I (Daerah maju dan tumbuh cepat): <i>Tidak ada</i>	Kuadran III (Daerah berkembang cepat): Yalimo, Nduga, Lanny Jaya
$r < \bar{r}$	Kuadran II (Daerah maju tapi tertekan): Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah	Kuadran IV (Daerah tertinggal): Yahukimo, Tolikara

Keterangan:

r = pertumbuhan ekonomi kabupaten

\bar{r} = pertumbuhan ekonomi provinsi

y = PDRB per kapita kabupaten

\bar{y} = PDRB per kapita provinsi

Kuadran I (Daerah maju dan tumbuh cepat) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang keduanya di atas rata-rata provinsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada satupun kabupaten yang termasuk dalam kuadran ini. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada daerah yang berhasil mencapai keunggulan ganda, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan per kapita yang tinggi secara simultan. Kuadran II (Daerah maju tapi tertekan) ditempati oleh daerah dengan pendapatan per kapita di atas rata-rata provinsi ($y > \bar{y}$) tetapi pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata provinsi ($r < \bar{r}$). Tiga kabupaten yang termasuk dalam kuadran ini adalah Jayawijaya, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Tengah. Artinya, kabupaten-kabupaten ini memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif tinggi, namun pertumbuhan ekonominya lambat atau mengalami perlambatan, sehingga berpotensi tertinggal jika tidak segera didorong pertumbuhannya. Kuadran III (Daerah berkembang cepat) ditempati oleh daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi ($r > \bar{r}$) tetapi pendapatan per kapitanya masih di bawah rata-rata provinsi ($y < \bar{y}$). Tiga kabupaten yang termasuk dalam kuadran ini adalah Yalimo, Nduga, dan Lanny Jaya. Kabupaten-kabupaten ini menunjukkan kinerja pertumbuhan yang baik, namun tingkat kesejahteraan penduduknya (yang tercermin dari pendapatan per kapita) masih rendah. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang tinggi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Kuadran IV (Daerah tertinggal) ditempati oleh daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang keduanya berada di bawah rata-rata provinsi ($r < \bar{r}$ dan $y < \bar{y}$). Dua kabupaten yang termasuk dalam kuadran ini adalah Yahukimo dan Tolikara. Kabupaten-kabupaten ini merupakan daerah yang paling memprihatinkan karena mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat sekaligus tingkat pendapatan per kapita yang rendah, sehingga memerlukan intervensi kebijakan prioritas dari pemerintah daerah dan pusat.

Selanjutnya secara sektoral, berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) untuk periode 2018-2022, ditemukan bahwa hanya ada enam sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori basis atau sektor unggulan di Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan sebelas sektor lainnya termasuk dalam kategori non basis, lihat Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Analisis Location Quotient (LQ) Provinsi Papua Pegunungan

No	Lapangan Usaha	LQ Rata ²	Kriteria
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,16	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0,87	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0,42	Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	Non Basis
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,31	Non Basis
6	Konstruksi	1,17	Basis

No	Lapangan Usaha	LQ Rata ²	Kriteria
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,79	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,59	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,59	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,39	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,51	Non Basis
12	Real Estate	0,68	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,42	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	1,22	Basis
15	Jasa Pendidikan	1,23	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	Basis
17	Jasa Lainnya	1,14	Basis

Sumber : BPS Provinsi Papua, data diolah (2024)

2. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4 berikut ini merangkum hasil uji statistik yang digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Hipotesis nol (H_0) dalam uji ini menyatakan bahwa model yang tepat adalah CEM, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa model yang tepat adalah FEM. Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000. Karena nilai ini lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, Fixed Effect Model (FEM) lebih baik daripada Common Effect Model (CEM)

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Penentuan Model Panel

Jenis Uji	Hipotesis	Nilai	Prob.	Ambang Batas	Kesimpulan
Uji Chow	H_0 : CEM H_1 : FEM	11,68284	0,0000	< 0,05	Tolak $H_0 \rightarrow$ Model FEM
Uji Hausman	H_0 : REM H_1 : FEM	81,77988	0,0000	< 0,05	Tolak $H_0 \rightarrow$ Model FEM

Sumber: data diolah (2024)

Selanjutnya, Uji Hausman digunakan untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa model yang tepat adalah REM, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa model yang tepat adalah FEM. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, Fixed Effect Model (FEM) juga lebih baik daripada Random Effect Model (REM). Berdasarkan kedua uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model regresi data panel yang paling tepat dan terbaik untuk penelitian ini. Pemilihan FEM mengindikasikan bahwa terdapat karakteristik unik atau efek spesifik dari masing-masing kabupaten (cross-section) yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi, dan efek tersebut bersifat tetap atau konstan sepanjang periode waktu penelitian. Dengan kata lain, perbedaan antar kabupaten seperti kondisi geografis, kebijakan lokal, atau infrastruktur yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan dan perlu diperhitungkan dalam model.

Setelah ditemukan model data panel yang tepat, yaitu model FEM, tahap selanjutnya adalah melakan uji asumsi klasik, dengan maksud untuk menetapkan apakah model regresi yang digunakan menghasilkan estimasi yang sah (valid) dan tidak bias. Terdapat tiga uji asumsi klasik yang dilakukan, yakni uji normalitas, heteroskedastis, dan autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

No	Jenis Uji	Statistik Uji	Nilai	Prob.	Ambang Batas	Kesimpulan
1	Normalitas (Jarque-Bera)	Jarque-Bera	2,2912	0,3180	> 0,05	Residual berdistribusi normal
2	Heteroskedastisitas (Glejser)	Obs*R-squared	25,9291	0,8654	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Autokorelasi	Prob (F-statistic)	1,8120	0,1368	> 0,05	Tidak terjadi autokorelasi

Pertama, uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual (error) dari model regresi berdistribusi normal. Hasil uji menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 2,291242 dengan nilai probabilitas sebesar 0,318026. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05 ($0,318026 > 0,05$), maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, residual model berdistribusi normal, sehingga model layak digunakan untuk inferensi statistik. Kedua, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,8654 yang lebih besar dari 0,05 ($0,8654 > 0,05$), sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diterima. Kesimpulannya, model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, yang berarti varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas). Ketiga, uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode waktu yang berbeda (dalam data panel). Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,136809 yang lebih besar dari 0,05 ($0,136809 > 0,05$), sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak terjadi autokorelasi diterima. Kesimpulannya, model tidak mengalami masalah autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik (normalitas, homoskedastisitas, dan bebas autokorelasi), maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), sehingga hasil uji hipotesis dan kesimpulan yang diambil dapat diandalkan secara statistik.

Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi klasik, dilakukan uji hipotesis parsial (uji t) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ketimpangan. Hasil uji t disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	0,506880	0,036744	13,79497	0,0000
X ₁ (Jumlah Penduduk)	0,670807	2,75E-07	2,423587	0,0180
X ₂ (Pendapatan Per Kapita)	0,759807	1,49E-08	7,060680	0,0000
a. Dependent : Ketimpangan				

Sumber : data diolah (2024)

Keterangan : model regresi dibangun berdasarkan model data panel FEM

Hasil uji hipotesis parsial (uji t) menunjukkan variabel Jumlah Penduduk (X₁) memiliki nilai koefisien sebesar 0,670807 dengan probabilitas sebesar 0,0180. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0180 < 0,05$), maka hipotesis nol (H₀) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan ditolak, dan hipotesis alternatif (H₁) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan diterima. Nilai koefisien yang positif (0,670807) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk di suatu kabupaten, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan ekonomi di kabupaten tersebut. Hal ini dapat dijelaskan bahwa daerah dengan jumlah penduduk besar cenderung menghadapi tekanan yang lebih

tinggi terhadap lapangan kerja, layanan publik, dan sumber daya, yang jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata akan memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Untuk variabel Pendapatan Per Kapita (X_2), hasil uji menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,759807 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Nilai koefisien yang positif (0,759807) mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Temuan ini sesuai dengan Teori Kuznet yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan pendapatan per kapita justru akan meningkatkan ketimpangan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menurun setelah mencapai titik tertentu. Nilai koefisien pendapatan per kapita (0,759) lebih besar dibandingkan koefisien jumlah penduduk (0,670), yang berarti bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap ketimpangan dibandingkan jumlah penduduk di Provinsi Papua Pegunungan.

Guna melengkapi hasil uji parsial ini, maka dilakukan uji hipotesis simultan (uji F) untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama. Hasil uji F disajikan pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

Statistik	Nilai
R-squared	0,572848
Adjusted R-squared	0,517929
F-statistic	10,43068
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber : data diolah (2024)

Hasil uji F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 10,43068 dengan nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,000000. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000000 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa secara simultan tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditolak, dan hipotesis alternatif (H_3) yang menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan diterima. Dengan demikian, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan periode 2018-2022.

Selanjutnya, nilai R-squared (koefisien determinasi) sebesar 0,572848 atau 57,28 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 57,28 persen variasi atau perubahan pada ketimpangan pembangunan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk dan pendapatan per kapita secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 42,72 persen ($100\% - 57,28\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti tingkat pendidikan, investasi, infrastruktur, kemiskinan, kebijakan pemerintah, dan faktor geografis. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,517929 (51,79%) merupakan nilai R-squared yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, yang juga mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan ketimpangan cukup baik.

3. Pembahasan

Temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan tergolong tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, nilai ketimpangan pada periode 2018 hingga 2022 berada pada kisaran 0,87 hingga 0,95, jauh di atas ambang batas 0,5 yang menandakan kategori tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di provinsi baru hasil pemekaran tersebut sangat memprihatinkan. Beberapa faktor penyebab utama ketimpangan yang diidentifikasi meliputi perbedaan kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, serta kurangnya lapangan kerja. Selain itu, ketimpangan juga dipicu oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan alokasi dana pembangunan antar wilayah yang tidak merata (Sjafrizal, 2008). Yang lebih menarik, observasi Perkasa (2023) memvalidasi bahwa ketimpangan yang dialami Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satu pemicu konflik sosial, yang pada gilirannya menghambat pembangunan itu sendiri. Ironisnya, kebijakan bantuan tunai langsung dan dana desa yang seharusnya mengurangi ketimpangan justru dikhawatirkan merusak mentalitas kerja OAP, menjadikan mereka bergantung pada bantuan dan semakin

memperparah ketimpangan. Dengan demikian, meningkatnya indeks Williamson dari 0,61 pada tahun 2013 menjadi 0,95 pada tahun 2022 tidak hanya menunjukkan masalah ekonomi, tetapi juga mengindikasikan adanya akar masalah sosial dan budaya yang lebih dalam.

Ketimpangan yang tinggi tersebut juga tercermin dari pola pertumbuhan ekonomi antar kabupaten yang sangat beragam. Hasil analisis Tipologi Klassen mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang termasuk dalam kategori daerah maju dan tumbuh cepat (Kuadran I). Hal ini berarti tidak ada wilayah yang berhasil mencapai keunggulan ganda, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan per kapita yang tinggi secara simultan. Tiga kabupaten, yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Tengah, tergolong sebagai daerah maju tapi tertekan (Kuadran II), karena meskipun pendapatan per kapitanya di atas rata-rata provinsi, pertumbuhan ekonominya justru melambat. Tiga kabupaten lainnya, yaitu Yalimo, Nduga, dan Lanny Jaya, termasuk daerah berkembang cepat (Kuadran III), dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun pendapatan per kapitanya masih rendah. Dua kabupaten yang paling memprihatinkan adalah Yahukimo dan Tolikara, yang masuk dalam kategori daerah tertinggal (Kuadran IV) karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya sama-sama di bawah rata-rata provinsi. Keragaman pola ini menegaskan bahwa setiap kabupaten memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga strategi pembangunan yang seragam tidak akan efektif.

Selain ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan, struktur ekonomi Provinsi Papua Pegunungan juga menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor tertentu. Hasil analisis Location Quotient (LQ) mengidentifikasi enam sektor basis (unggulan) di provinsi ini, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (LQ 1,16); Konstruksi (LQ 1,17); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (LQ 1,22); Jasa Pendidikan (LQ 1,23); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (LQ 1,17); serta Jasa Lainnya (LQ 1,14). Dominasi sektor pertanian dan kehutanan sangat wajar mengingat kondisi geografis pegunungan yang subur, sementara dominasi sektor jasa publik mencerminkan besarnya peran pemerintah di provinsi baru hasil pemekaran. Menarik untuk dicermati, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Kurniawati dan Cahyono (2022) serta De Fretes (2017) di Provinsi Papua yang justru menempatkan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua Pegunungan memiliki karakteristik ekonomi yang unik, berbeda dengan provinsi tetangganya. Sebelas sektor lainnya, termasuk industri pengolahan (LQ 0,42) dan perdagangan (LQ 0,79), termasuk kategori non basis. Lemahnya sektor industri pengolahan dan perdagangan mengindikasikan bahwa perekonomian provinsi ini masih sangat bergantung pada sektor primer dan jasa publik, sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi.

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan regresi data panel. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pemilihan model terbaik melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga Fixed Effect Model (FEM) dipilih daripada Common Effect Model (CEM). Hasil Uji Hausman juga menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0000 ($< 0,05$), yang kembali mengonfirmasi bahwa FEM lebih tepat daripada Random Effect Model (REM). Dengan terpilihnya FEM, hal ini mengindikasikan bahwa setiap kabupaten memiliki karakteristik unik yang bersifat tetap dan mempengaruhi ketimpangan, seperti kondisi geografis, kebijakan lokal, atau kualitas infrastruktur yang berbeda-beda.

Setelah model terpilih, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid. Uji normalitas dengan Jarque-Bera menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,318026 ($> 0,05$), yang berarti residual model berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,8654 ($> 0,05$), sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menghasilkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,136809 ($> 0,05$), yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik, model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), sehingga hasil uji hipotesis dapat diandalkan secara statistik.

Hasil uji hipotesis parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai koefisien sebesar 0,670 dengan probabilitas 0,0180 ($< 0,05$). Temuan ini membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu kabupaten, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan di kabupaten tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Lincoln (dalam Arsyad, 2010) bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan berbagai masalah karena pesatnya penambahan tenaga kerja tidak

diimbangi dengan kemampuan daerah menciptakan lapangan kerja baru. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Muharam (2022) di Yogyakarta yang menemukan korelasi negatif antara populasi dan ketimpangan, yang menunjukkan bahwa pengaruh jumlah penduduk sangat kontekstual tergantung pada karakteristik wilayah.

Variabel pendapatan per kapita juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, dengan nilai koefisien sebesar 0,759 dan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$). Nilai koefisien yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap ketimpangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hartini (2017) di Yogyakarta, dan sesuai dengan Teori Kuznet yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan pendapatan per kapita justru akan meningkatkan ketimpangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menurun setelah mencapai titik tertentu. Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa nilai PDRB per kapita yang tinggi mungkin disebabkan oleh adanya segelintir kelompok masyarakat yang berpenghasilan sangat tinggi, sehingga angka rata-rata menjadi bias dan tidak mencerminkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Hasil uji hipotesis simultan (uji F) memperkuat temuan-temuan sebelumnya, dengan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa jumlah penduduk dan pendapatan per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Nilai R-squared sebesar 0,572848 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan sekitar 57,28 persen variasi ketimpangan, sementara sisanya sebesar 42,72 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti tingkat pendidikan, investasi, infrastruktur, kemiskinan, dan kebijakan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Azizah dkk (2018) di Provinsi Jawa Timur, yang membuktikan bahwa jumlah penduduk dan pendapatan per kapita secara simultan mempengaruhi ketimpangan atau kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami akar penyebab ketimpangan di Provinsi Papua Pegunungan. Ketimpangan yang tinggi dan terus meningkat tidak hanya disebabkan oleh faktor demografi dan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit, dominasi sektor pertanian dan jasa publik, lemahnya sektor industri dan perdagangan, serta faktor sosial budaya seperti perubahan mentalitas akibat kebijakan bantuan tunai. Karenanya, upaya mengatasi ketimpangan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan memerlukan strategi yang komprehensif dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten. Daerah tertinggal seperti Yahukimo dan Tolikara memerlukan intervensi prioritas, sementara daerah berkembang cepat seperti Yalimo, Nduga, dan Lanny Jaya perlu dipastikan bahwa pertumbuhan ekonominya dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara merata. Yang tidak kalah penting, kebijakan bantuan sosial perlu dirancang ulang agar tidak menciptakan ketergantungan, tetapi justru memberdayakan masyarakat OAP sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja keras yang telah melekat secara naluriah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama, yaitu :

- a. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan tergolong tinggi dan terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Seluruh nilai Indeks Williamson selama periode penelitian berada dalam kategori tinggi, dengan kecenderungan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan belum mampu dinikmati secara merata oleh seluruh wilayah di provinsi tersebut. Dimana berdasarkan analisis Tipologi Klassen, diketahui bahwa tidak ada satupun kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah maju dan tumbuh cepat. Beberapa kabupaten seperti Jayawijaya, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Tengah masuk dalam kategori daerah maju tapi tertekan, artinya memiliki pendapatan per kapita yang relatif tinggi namun pertumbuhan ekonominya melambat. Kabupaten Yalimo, Nduga, dan Lanny Jaya termasuk dalam kategori daerah berkembang cepat, artinya memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun pendapatan per kapitanya masih rendah. Sementara itu, Kabupaten Yahukimo dan Tolikara termasuk dalam

- kategori daerah tertinggal, artinya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya sama-sama berada di bawah rata-rata provinsi.
- b. Berdasarkan hasil analisis model regresi data panel dalam bentuk FEM diperoleh bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk di suatu kabupaten, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan ekonomi di kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan memperbesar tekanan terhadap sumber daya yang ada, sehingga kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Sementara itu untuk variabel pendapatan per kapita, juga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Bahkan, pengaruh pendapatan per kapita terbukti lebih dominan dibandingkan pengaruh jumlah penduduk. Temuan ini sesuai dengan Teori Kuznet yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan pendapatan per kapita justru akan meningkatkan ketimpangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menurun setelah mencapai titik tertentu.
 - c. Secara simultan terbukti bahwa jumlah penduduk dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi ketimpangan yang terjadi, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model seperti tingkat pendidikan, investasi, infrastruktur, kemiskinan, dan kebijakan pemerintah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa permasalahan ketimpangan di provinsi ini tidak dapat diabaikan dan memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.

2. Saran-Saran

Secara teoritis, penelitian ini mengonfirmasi Teori Kuznet bahwa peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka pendek justru memperlebar ketimpangan, namun karena masih terdapat sekitar empat puluh tiga persen variasi ketimpangan yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel seperti tingkat pendidikan, investasi, infrastruktur, dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, mengingat Provinsi Papua Pegunungan memiliki karakteristik unik sebagai satu-satunya provinsi terkurung daratan di Indonesia, diperlukan pengembangan model teoritis yang lebih kontekstual untuk wilayah pegunungan dan wilayah tanpa garis pantai. Temuan tentang dampak negatif bantuan tunai terhadap mentalitas kerja masyarakat adat juga membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif untuk menggali aspek sosial budaya dan ekonomi politik yang mempengaruhi ketimpangan.

Adapun secara praktis, pemerintah daerah diharapkan menggerakkan enam sektor unggulan yang telah teridentifikasi yaitu pertanian, konstruksi, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya melalui peningkatan produktivitas, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah juga perlu meningkatkan pembangunan manusia melalui pelatihan keterampilan dan kursus vokasi yang relevan agar masyarakat, terutama penduduk asli Papua, mampu bersaing di pasar kerja dan membuka lapangan kerja sendiri. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada pemerataan lapangan kerja melalui proyek padat karya, perluasan akses terhadap sarana publik seperti jalan dan listrik, serta pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang menggantikan skema bantuan tunai agar tidak menciptakan ketergantungan. Terakhir, pemerintah perlu memberikan intervensi prioritas bagi daerah tertinggal seperti Yahukimo dan Tolikara, mendorong kembali pertumbuhan di daerah maju tapi tertekan, serta memastikan pertumbuhan di daerah berkembang cepat dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, T. S. (2017). Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB per kapita, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang tahun 2001-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).

- Arif, M., dan Wicaksana, R. A. (2017). Ketimpangan pendapatan propinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *URECOL*, 323-328.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Azizah, E. W., Sudarti, S., dan Kusuma, H. (2018). Pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167-180.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Pedoman perhitungan proyeksi penduduk dan angkatan kerja*. Badan Pusat Statistik.
- De Fretes, P. N. (2017). Analisis sektor unggulan (LQ), struktur ekonomi (shift share), dan proyeksi produk domestik regional bruto Provinsi Papua 2018. *Develop*, 1(2).
- Firman, F., Parinusa, S., dan Maspaiteella, M. R. (2023). Analisis peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Papua Barat pendekatan input-output. *Lensa Ekonomi*, 17(1), 17-37.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB per kapita, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6(6), 530-539.
- Kurniawati, A. D., & Cahyono, H. (2022). Optimalisasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan analisis sektor unggulan di Papua. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 49-63.
- Maspaiteella, M., Parinussa, S. M., & Tewernusa, K. I. (2021). Applying location quotient and shift-share analysis in determining leading sectors in Teluk Bintuni Regency. *Journal of Developing Economies*, 6(1), 55-65.
- Muharam, K. I. (2022). Analisis ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2020 (Studi kasus di 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi DIY). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 284-294.
- Nagao, K. (1993). Changing Regional Income Disparities in Canada, 1951-1989. *Journal Free Access*, 45(6), 559-580.
- North, D. C. (1991). Institutions. *The Journal of Economic Perspectives*, 5(1). 97-112.
- Perkasa, V. D. (2023). Papua dan Ekonomi Politik yang Destruktif. [<https://www.kompas.id/artikel/papua-dan-ekonomi-politik-yang-destruktif>]
- Sama, A. A. F. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sulawesi (Tahun 2011-2015). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.
- Suyatno. (2000). *Pembangunan daerah di Indonesia*. (Tidak dipublikasikan – disebut dalam artikel sebagai sumber rujukan).
- Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 3-45.
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(1), 41–60.